

K O L O M

BHMN PT: Menuju Kapitalisme Pendidikan



Oleh: Sulardi

ABSTRACT

Education in Indonesia seems not providing better future for students because the recent policy in education tends to lead on capitalization of higher education through *PT BHMN*. The autonomy issue is perceived to make the cost of education higher. However, *UUD 1945* allows the 25% of national funds for education purpose for making the education reachable for every one..

Many party reject the policy of *PT BHMN* with the arguments that *PT BHMN* has changed the visions of education: education to enlighten people is no more achieved, only few parts of people can achieve it. It is assumed that capitalism plays role in this sociable and agricultural country.

Survei terhadap Perguruan Tinggi (PT) yang diselenggarakan Majalah *Asiaweek* tahun 2000 menunjukkan PT papan atas Indonesia (UI dan UGM), hanya mampu menduduki posisi 61 dan 68 dari 77 PT yang ikut disurvei. UGM, hanya menduduki ranking 43 dalam kualitas akademik, ranking 77 dalam kualitas dosen, ranking 69 dalam kualitas penelitian, ranking 73 dalam sumber keuangan, 76 dalam publikasi ilmiah, dan 71 dalam fasilitas teknologi informasi.

PT papan atas saja berada di urutan bawah, apalagi PT yang lain. Dalam status di tangga bawah itulah, maka ada upaya dari negara ini untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan Indonesia di tingkat global tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi, memberikan kemandirian bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang kelak akan menjadi PT BHMN—Perguruan Tinggi yang berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara. Dari sisi ini tentunya dapat diterima bentuk BHMN tersebut. Namun, ternyata bentuk PT BHMN mengandung konsekuensi secara ekonomis, biaya masuk dan kuliah menjadi mahal. Sebab, sumber keuangan PTN yang langsung bisa dicari salah satunya melalui pungutan kepada calon mahasiswa dan mahasiswanya, walaupun pemerintah tidak menutup pintu untuk mengucurkan dana kepada PT BHMN melalui *blog grant* yang ada.

Untuk di ketahui bahwasannya saat ini telah banyak PTN yang berstatus BHMN misalnya penetapan UI sebagai BHMN melalui PP Nomor 152 tahun 2000, UGM melalui PP 152 Tahun 2000, ITB melalui PP 154 Tahun 2000, dan IPB melalui PP 155 Tahun 2000. Tiga PTN lainnya, yakni Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, juga telah menyusul berstatus BHMN. Dengan menjadi PT BHMN problematika pendidikan di negara ini menjadi semakin kompleks saja. Tulisan pendek ini mencoba mengurai konsekuensi PT BHMN terhadap akses mendapatkan pendidikan tinggi bagi semua kalangan.

Sesungguhnya harus diingat, kata bijak Paulo

Freire yang berpendapat bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada konsepsi dasar memanusiakan kembali manusia yang telah mengalami *dehumanisasi* akibat sistem dan struktur sosial yang menindas (*Pedagogi of the Oppressed*, New York 1986:67). Begitu pentingnya arti pendidikan, para pendiri negara Indonesia mencantumkan tujuan negara ini ke dalam pembukaan konstitusinya, yakni: "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menciptakan perdamaian dunia".

Namun sayang tujuan mulia para pendiri bangsa ini sampai enam puluh dua tahun kemerdekaan belum ada tanda-tanda akan menjadi kenyataan. Yang terjadi justru pendidikan di Indonesia penuh dengan warna keburaman. Dari sisi mana pun melihat pendidikan di Indonesia penuh dengan problematik, jumlah sekolah yang sangat besar, jumlah guru yang banyak (meskipun selalu merasa kurang), kompetensi para pendidik yang banyak tidak sesuai dengan kebutuhan dan tugas tugasnya. Kualitas lulusan pun belum mempunyai standar kompetensi yang semestinya. Apalagi sarana, dan kurikulum yang belum mapan. Hal tersebut ditambah dengan campur tangan pemerintah dalam proses penyelenggaraan melalui berbagai kebijakan yang justru malah menghambat kemajuan pendidikan itu.

Di Indonesia, pendidikan justru telah kehilangan roh pendidikan — yakni mencerdaskan dan membebaskan dari kebodohan — yang pada gilirannya meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan tidak memberikan jaminan apa pun di masa depan bagi para peserta didiknya selain selebihnya ijazah bila lulus nanti. Peserta didik tidak memiliki harapan dan kepastian akan bekerja dimasa setelah mereka lulus. Akibatnya peserta didik menjadi berperilaku yang jauh dari semestinya sebagai insan berpendidikan, yakni; berkelahi, tawar-menawar, bahkan tidak jarang siswa yang kesurupan saat di sekolah.

Kondisi yang belum menuju perbahaan ditambah dengan biaya pendidikan yang mahal. Kalau pun ada sekolah yang SPPnya telah ditekan dapat dipastikan ditemui pungutan yang lain yang justru lebih mahal dibanding dengan biaya

pendidikan yang seharusnya dikeluarkan oleh peserta didik. Namun keluhan masyarakat atas mahalnya pendidikan ini justru tidak direspon dengan bagaimana menciptakan pendidikan yang terjangkau bagi semua warga. Yang terjadi justru liberalisasi pendidikan terutama pendidikan tinggi. Sekolah, perguruan tinggi negeri digiring menjadi PT BHMN diwadahi dalam PP 61/1999.

Walaupun filosofi menjadikan PT sebagai BHMN berangkat dari kemandirian dan PT yang otonom, namun kenyataannya menjadikan biaya PT tidak hanya mahal, tetapi sangat mahal, sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan. Pendidikan tinggi akhirnya akan menjadi pendidikan elit yang kapitalis. Dimana dasar acuan yang digunakan adalah adanya kompetisi global yang semakin tajam, tekanan masyarakat tentang perlunya peningkatan demokrasi dalam bernegara maupun keinginan yang kuat dari masyarakat sekarang untuk menuju masyarakat madani (*civil society*) dan perlunya suatu institusi yang bisa berperan sebagai kekuatan moral (*moral force*) dalam mewujudkan itu semua.

PT merupakan salah satu institusi yang mempunyai kapabilitas untuk memberikan kontribusinya, di samping perlunya menjaga keseimbangan fungsi PT dalam ikut di percaturan pengembangan ilmu dalam komunikasi global dan menjaga identitas jati diri karena sejarah dan budaya bangsa yang melekat padanya (*University Autonomy, Background paper Document I, Ditjen Dikti, 1999*). Namun demikian, menurut Sahid Susanto, (*Kompas* 27/1/2000), bahwa manajemen PT masih harus mengikuti berbagai aturan sekarang menjadikan sulit atau bahkan tidaklah mungkin untuk berperanan sesuai dengan fungsinya tersebut secara optimal. Aturan yang dimaksud misalnya UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 30/1989 yang kemudian disempurnakan dengan PP 57/1998 dan 60/1999 tentang pendidikan tinggi, Kepmen No 956/U/1994 tentang kurikulum nasional, UU tentang Keperguruan tahun 1925 (*Indische Comtabiliteit Wet/IOF*)-suatu produk hukum sejak kolonialisme Belanda-, UU No 8/1974 tentang Pegawai Ne-

geri Sipil (*Civil Service Law*) yang telah diperbarui dengan UU No 43/1999, PP No 77/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS), PP No 3/1980 tentang Kepangkatan.

Pendidikan Kapitalis Melahirkan Generasi Kapitalis

Kondisi Pendidikan di Indonesia yang diarahkan pada liberalisasi itu menunjukkan pendidikan Indonesia memasukan diri pada arus hegemoni ideologi dominan kapitalisme, yang pada akhirnya hanya orang yang berduit saja yang mampu mengenyam pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Orang miskin akan ditinggalkan dan akan tetap miskin dan bodoh. Inilah hakikatnya bahwa pendidikan belum mampu mengentas kebodohan menjadi kecerdasan dan kemiskinan tetaplah kemiskinan. Warga miskin jelas tidak bisa merasakan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Padahal, pendidikan kapitalistis hanya akan melahirkan generasi yang kapitalistis juga. Mahalnya pendidikan tinggi setelah menjadi PT BHMN bisa dilihat pada model seleksi masuk PT yang dibuka melalui berbagai jalur. ITB, meski secara dominan masih menggunakan SPMB sebagai jalur masuk mahasiswa baru, membuka pintu lain yakni Penelusuran Minat Bakat dan Potensi (PMBP) dengan persyaratan sumbangan dana pendidikan (SDP) Rp 60 juta.

Hal serupa dilakukan UI, UGM, dan IPB dan PT BHMN lainnya dengan nama berbeda-beda — namun dengan substansi serupa — jalur-jalur baru sebagai saluran untuk berkuliah di sana tetap berjalan. Semua menggunakan alasan upaya tersebut sudah *taken for granted* sebagai upaya menuju kemandirian pelaksanaan pendidikan tinggi di kampus masing-masing.

Setiap PT mempunyai alasan tersendiri dengan dibukanya jalur khusus tersebut dalam penerimaan mahasiswa baru. Jelas dengan adanya jalur khusus yang biayanya lebih mahal dibanding melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), hal ini membuka pintu yang lebih lebar bagi orang yang berduit untuk menyegerakan masuk ke PTN BHMN. Sedang yang kemampuan

keuangannya *pas-pas an* akan berebut melalui jalur biasa yaitu SPMB, tentunya jumlah kursi yang sudah dikurangi oleh jalur khusus tersebut.

Pada hal dalam proses pendidikan, para peserta didik akan terlibat secara emosional didalamnya secara total, sehingga watak kapitalis pendidikan yang dirasakannya pun akan menumbuhkan spirit kapitalis juga dalam kehidupannya kelak. Ketika kapitalis sudah mengakar dalam diri, maka pendidikan yang mestinya berwatak humanis menjadi kehilangan arah ke sana. kapitalis tetap kapitalis yang melihat segala hal dari sisi untung dan rugi.

Secara demikian pantas dipertanyakan, apakah perubahan status PTN menjadi PT BHMN sertamerta memberikan angin positif bagi sosok PT ideal sebagaimana yang diharapkan? Apakah dengan demikian PT mampu dengan cepat mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan atau peringkat PT di tingkat global setidaknya dari PT-PT di negara tetangga terdekat? Jawabnya PT BHMN belum bisa menjadi solusi terbaik, terbukti PT BHMN justru menjadi PT yang biaya pendidikan tidak terjangkau bagi semua kalangan.

Solusi Alternatif

Penyelenggaraan PT BHMN sudah dirasakan banyak kalangan tidak memihak pada warga miskin. Sesungguhnya hal ini bisa dihindari dengan mengembalikan dan mengingatkan pada pemerintah selaku penyelenggara negara, bahwa pendidikan merupakan hak warga, sehingga pemerintah wajib menyelenggarakan. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan semestinya negara memposisikan diri sebagai fasilitator dan regulator saja.

Dengan demikian, jika pemerintah konsekuen dengan UUD 1945 yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, maka penyelenggaraan pendidikan akan dapat diikuti oleh semua warga. Dengan tersedianya dana pendidikan dengan sendirinya terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Kondisi ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan masyarakat Indonesia. Dengan peningkatkan kualitas ini,

maka warga negara telah siap untuk berkompetensi di dunia global yang tak terhindarkan itu.

Penutup

Banyak kalangan yang sesungguhnya menolak penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui PT BHMN dengan berbagai argumen. Intinya dengan status PT BHMN, maka pendidikan di Indonesia telah terjadi perubahan misi yang semula pendidikan mestinya mencerdaskan bagi semua warga, menjadi hanya sebagian warga. Itu pun dengan wajah yang berubah menjadi kapitalistik yang mencetak kapitalis baru di negara yang sosialis dan agraris ini.

Penyelenggaraan PT BHMN telah berjalan, bahkan pada masa yang akan datang seluruh PTN di Indonesia akan menjadi PT BHMN, menyusul akan disahkannya RUU BHP menjadi UU BHP, yang memberi payung hukum lebih kuat bagi PTN untuk menjadi PT BHMN.

Di era globalisasi yang tak bisa dibendung ini melahirkan insan yang mampu berkompetensi di tingkat global memang sangat diperlukan. Namun, ketika peluang untuk meningkatkan kualitas hanya terbuka bagi mereka yang kaya saja, maka jelas semangat globalisasi yang telah menunjukkan siapa yang kuat dia yang menang dalam bersaing telah ditunjukkan secara vulgar oleh PT-BHMN di Indonesia. Siapa yang kuat secara ekonomi, maka mereka yang menang dalam berkompetensi memasuki PT BHMN.

Satu satunya jalan keluar dari problem pendidikan yang carut marut itu, saat ini adalah dengan menyelenggarakan pendidikan pada sega tingkatan dengan biaya yang terjangkau bagi semua warga dan mencegah pendidikan sebagai bagian dari komoditas industri. Jika ini yang terjadi, maka tujuan negara Indonesia yang sejak awal ditulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan segera terwujud.